



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
LAMPUNG BARAT



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

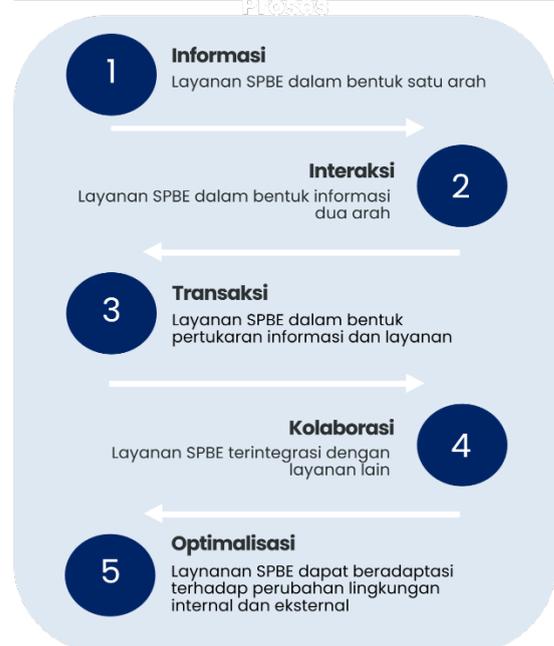
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



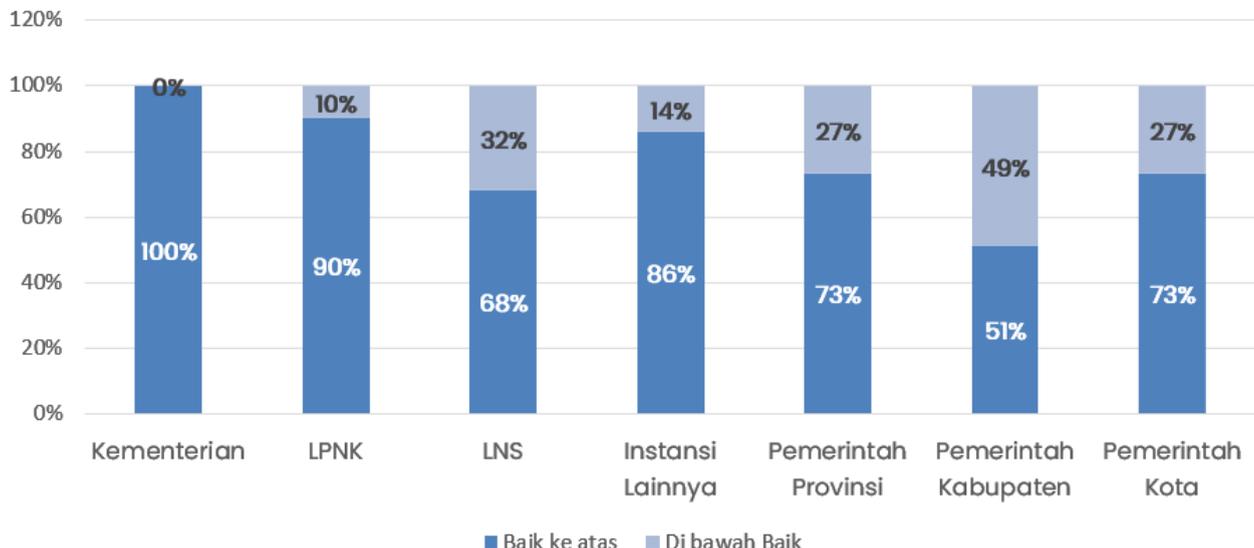
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

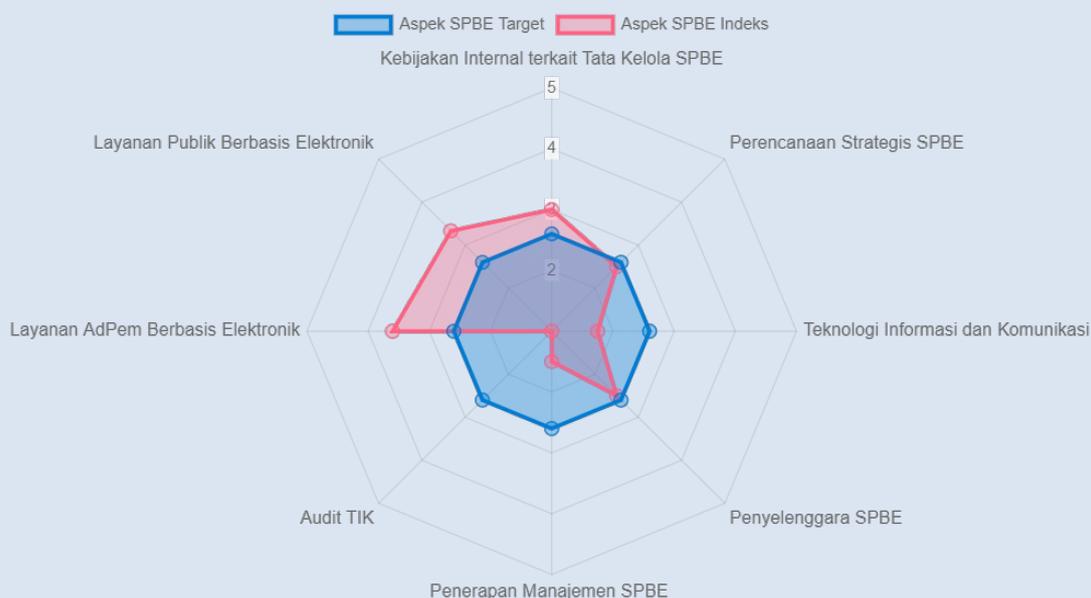
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,75
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,50
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,49
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE (semua Indikator dipenuhi).

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi Kekuatan
- Kelemahan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah dengan adanya Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan Rencana dan Anggaran, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum memiliki memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta belum didokumentasikan secara formal, juga belum memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Pencana penerapan SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan adanya Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra.

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum melaksanakan (atau mendokumentasikan) Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan tahapan SDLC, belum menyediakan Layanan Jaringan Intra yang mencakup semua unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dan belum menerapkan sistem penghubung layanan berbasis API dan mencakup seluruh unit kerja.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan kolaborasi dalam penerapan SPBE yang melibatkan semua unit kerja.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan

Manajemen Layanan SPBE. Penerapan Manajemen ini tidak dapat berjalan dikarenakan belum tercantum secara detail di dalam Peta Rencana dan tidak ada pedoman dalam pelaksanaannya.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung.

- Kekuatan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum mencantumkan melaksanakan Audit terhadap Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan SPBE sama sekali.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan adanya layanan SPBE di bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai (semua Indikator terpenuhi).

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan SPBE di bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, dan Kearsipan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan telah menggunakan aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat: SIPD. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan aplikasi LPSE, Layanan Kepegawaian menggunakan aplikasi SIASN, Layanan Kearsipan menggunakan aplikasi SRIKANDI.
- Kelemahan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, Publik Sektor 2, dan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 1 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan SP4N-LAPOR dan Jaga.ID. Layanan JDIH menggunakan aplikasi JDIH. Sedangkan Layanan Publik Sektor 1 menggunakan aplikasi OSS.
- Kelemahan
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat adalah pada penerapan Aspek Layanan SPBE, terutama layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini dapat digunakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang melayani dan berdedikasi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih memiliki keterbatasan untuk menerapkan SPBE secara lebih baik Aspek perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Tidak tersedianya Arsitektur dan Peta Rencana yang komprehensif sangat mempengaruhi penerapan SPBE pada Aspek lain, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen SPBE, dan Audit TIK.

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas sudah dicapai dan sangat memuaskan. Namun begitu, aspek Perencanaan Strategis perlu diberikan prioritas dalam waktu dekat. Pakar dari Universitas dapat diajak untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE akan menjadi acuan dalam aspek TIK, sedangkan Peta Rencana menjadi pijakan, acuan dan pedoman pelaksanaan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Bahkan Peta Rencana juga dapat mempengaruhi jenis dan kualitas layanan yang harus disediakan, baik untuk administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Jadi, Pemerintah Lampung Barat perlu segera menyiapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Kemudian memastikan bahwa setiap kegiatan penerapan SPBE merujuk ke Peta Rencana SPBE serta mendokumentasikan setiap kegiatan tersebut secara formal.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3